

IEFF

03.01.2024

DITERIMA

Januari 2024

DIREVISI

Januari 2024

DISETUJUI

Februari 2024



IEFF

INDEKSASI

Google Scholar

PENULIS

KORESPONDENSI

Hayatuzzahrah Taqiyyah

✉ zahrataqiyyah22@gmail.com

📍 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Indonesia

ANALISIS PERAN DANA DESA DAN *ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX (I-HDI)* TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN (STUDI KASUS PADA PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2018 - 2022)

Hayatuzzahrah Taqiyyah*, Sri Muljaningsih

Ekonomi Islam, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia

Abstract: Poverty is still a major problem today in the economy. This problem is increasing with the COVID-19 pandemic. The solution to poverty alleviation is carried out by the government, namely the allocation of village funds. In addition, poverty alleviation can be seen from human resources which is a factor in poverty, namely the Islamic Human Development Index by applying aspects of Maqashid Syariah. The purpose of this study is to see how the influence of village funds and the Islamic Human Development Index on poverty alleviation in East Java Province. This research is quantitative using panel data analysis with variables of village funds, Islamic Human Development Index (X variable) and poverty rate (Y variable). The research was conducted in 29 districts in East Java in the period 2018-2022. The result of this study is the selection of fixed effect model. Furthermore, the village fund variable has a negative and significant influence on the poverty rate in East Java. The Islamic Human Development Index variable has a negative and insignificant effect on the poverty rate. This result is expected to be an effective solution for poverty alleviation through village funds in order to maximize allocation and the Islamic Human Development Index has a further impact on poverty alleviation.

Keywords: Corporate Social Responsibility Disclosure; Corporate Social Responsibility; Profitabilitas; Leverage; Liquidity

Abstrak: Kemiskinan masih menjadi masalah utama saat ini dalam perekonomian. Masalah ini semakin meningkat dengan adanya pandemi COVID-19. Solusi pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan alokasi dana desa. Selain itu, pengentasan kemiskinan dapat dilihat dari sumber daya manusianya yang menjadi faktor kemiskinan, yaitu *Islamic Human Development Index* dengan menerapkan aspek dalam Maqashid Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh dana desa dan *Islamic Human Development Index* terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan analisis data panel dengan variabel dana desa, *Islamic Human Development Index* (variabel X) dan tingkat kemiskinan (variabel Y). Penelitian dilakukan pada 29 kabupaten di Jawa Timur pada periode 2018-2022. Hasil dari penelitian ini adalah dengan terpilihnya *fixed effect model*. Selanjutnya, variabel dana desa memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Variabel *Islamic Human Development Index* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk pengentasan kemiskinan melalui dana desa agar memaksimalkan alokasi serta *Islamic Human Development Index* memiliki dampak lebih jauh dalam pengentasan kemiskinan.

Kata kunci: Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial; Tanggung Jawab Sosial; Profitabilitas; leverage; likuiditas

Cite this as: Taqiyyah, H. & Muljaningsih, S. (2024). Analisis Peran Dana Desa Dan *Islamic Human Development Index (I-HDI)* Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Timur Periode 2018 - 2022). *Islamic Economics and Finance in Focus*. Volume 3, Number 1, Pages 43-60. Universitas Brawijaya. DOI: <http://dx.doi.org/10.21776/ieff.2024.03.01.04>

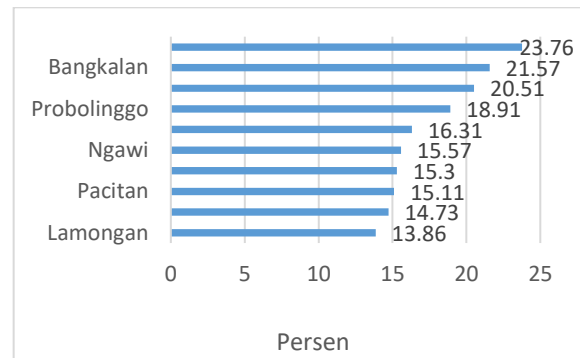
PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah dalam pemerataan pembangunan Indonesia adalah hal yang saat ini sedang diwujudkan dengan banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan dari adanya pembangunan ekonomi salah satunya adalah pengentasan kemiskinan di daerah. Kemiskinan menjadi hal yang serius dan merupakan fenomena yang kompleks dalam suatu negara. Keteringgalan dan penghambat dalam pembangunan suatu negara menjadi faktor penyebab angka kemiskinan semakin meningkat (Kuncoro, 2006). Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor kemiskinan semakin bertambah dan menyebabkan sektor ekonomi terdampak hingga terjadi naiknya tingkat kemiskinan di Indonesia.

Kemiskinan menjadi masalah utama saat ini pada perekonomian Indonesia dikarenakan masyarakat belum memenuhi kebutuhan pokok hidupnya (Aiu Viollani et al., 2022). Pengentasan kemiskinan ini dapat dideteksi melalui langkah awal dari penyebab terjadinya kemiskinan dan akibatnya. Tingginya angka kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga berpotensi dalam menghambat pembangunan (Aiu Viollani et al., 2022). Maka dari itu diperlukan solusi dari pengentasan kemiskinan salah satunya adalah dengan memberdayakan sumber daya manusia dengan meningkatkan *skill* serta kemampuan individu masyarakat (Aiu Viollani et al., 2022)

Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2022, persentase tingkat kemiskinan Indonesia tahun 2022 mengalami peningkatan dengan data terakhir pada September 2022 mencapai 26,36 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2022). Hal ini dilihat dengan peningkatan yang dibandingkan dengan bulan Maret 2022. Jumlah penduduk miskin menurut daerah pada rentang waktu September 2021 – September 2022 yang disesuaikan dengan daerah tempat tinggal, yaitu perkotaan dan pedesaan. Penduduk miskin perkotaan mengalami kenaikan sebesar 0,16 juta orang dan pedesaan naik sebesar 0,04 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2022). Setiap provinsi di Indonesia memiliki permasalahan dalam kemiskinan yang saat ini belum terselesaikan. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia sesuai

dengan data BPS terbaru yang merilis data tentang profil kemiskinan pada tahun 2023 (Surabaya Pagi, 2023). Hal ini turut menjadi perhatian terhadap kebijakan pemerintah untuk menghadapi permasalahan tersebut.



Gambar 1. Grafik Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Tertinggi Di Jawa Timur 2021

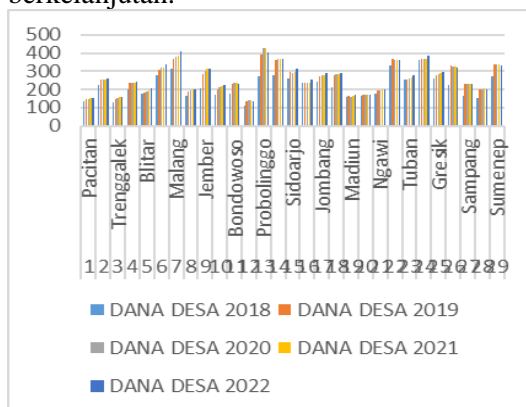
Sumber: databoks.katadata.co.id (Databoks, 2022)

Berdasarkan pada grafik di atas, penduduk miskin di Jawa Timur pada 2021 bertambah dibandingkan dengan 2020. Data (BPS Provinsi Jawa Timur, 2021) melalui berita statistik, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 menurun sebesar 13,24 ribu jiwa menjadi 4,57 juta dibandingkan dengan September 2020. Persentase penduduk miskin pada Maret 2021 menurut 0,06 persen dibandingkan dengan September 2020. Adapun faktor yang menyebabkan kenaikan penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur pada periode September 2020 – Maret 2021, yaitu diantaranya situasi pandemi COVID-19, terjadi inflasi umum, komoditi makanan mengalami perubahan, dan indeks upah buruh mengalami kenaikan (BPS Provinsi Jawa Timur, 2021). Tiga kabupaten di Pulau Madura memimpin dengan angka kemiskinan tertinggi se-Jawa Timur dengan posisi pertama, yaitu Kabupaten Sampang mencapai 23,76% pada Maret 2021 dan dua kabupaten lainnya. Dilanjutkan dengan kabupaten lain, yaitu Probolinggo, Tuban, Ngawi, Pamekasan, Pacitan, Bondowoso, dan Lamongan.

Solusi pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia salah satunya adalah dengan kebijakan alokasi dana ke daerah yang nantinya disebarkan kepada daerah yang lebih kecil lagi, yaitu desa

(Tarmizi et al., 2020). Pengalokasian dana desa menjadi tujuan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam mendukung program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, program pendidikan dan kesehatan, serta program lainnya (Tarmizi et al., 2020). Adanya desentralisasi desa bertujuan untuk meningkatkan kinerja dalam layanan pada tingkat administrasi terendah hingga menangani masalah kesejangan sosial (Lewis, 2015). Pemberian dana desa dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan hak desa serta penyelenggaraan otonomi desa yang akan berkembang. Hal ini berdasarkan hukum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang desa, termasuk di dalamnya aturan dalam dana desa.

Penggunaan dana desa memiliki arahan dalam menetapkan pelaksanaannya yang sudah ada dalam undang-undang. Dalam Permendes Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 menjelaskan terkait dengan tiga poin yaitu, pemulihan ekonomi desa, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam. Tiga poin ini menjabarkan secara rinci untuk menetapkan arahan dalam implementasi dana desa dan disesuaikan dari pedoman pembangunan yang berkelanjutan atau *SDGs* desa. Penetapan undang-undang ini dilatarbelakangi oleh tujuan pembangunan dana desa, yaitu untuk peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dalam memenuhi kebutuhan pokok, serta kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.

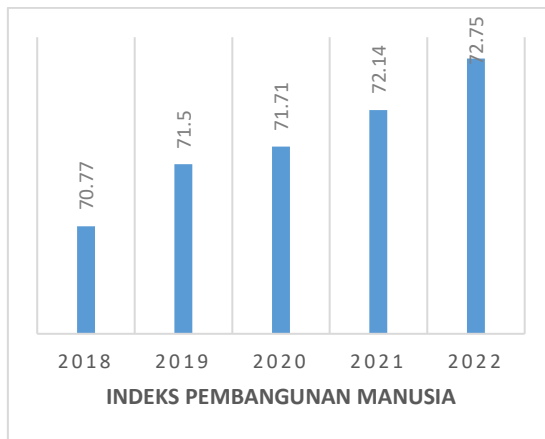


Gambar 2. Dana Desa Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 – 2022

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (DJPk Kemenkeu, 2022)

Berdasarkan grafik di atas merupakan dana desa dari APBN yang dialokasikan untuk Jawa Timur pada 2018-2022. Dana desa dari tahun ke tahun cukup signifikan dengan banyak peningkatan pada tahun 2022. Jawa Timur menjadi provinsi tertinggi kedua dengan alokasi dana desa terbesar di Indonesia. Pemerintah menganggarkan dana desa untuk Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 7,76 Triliun pada Tahun 2022 untuk 7.724 desa dan angka ini meningkat sebesar 100,268 miliar dibandingkan dengan Tahun 2021 (Zahro, 2022). Dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur cukup cepat dalam mengalokasikan dana desa kepada kabupaten di Jawa Timur. Namun, dalam praktiknya masih saja terjadi penyalahgunaan dana, seperti kesalahan administrasi dalam pencatatan, dana yang di *mark up* dalam pelaksanaan pembangunan, serta kasus lainnya (Nuraini et al., 2021).

Selanjutnya, faktor penyebab kemiskinan dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia. Hal ini dapat dilihat dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi indikator dalam pembangunan manusia yang penting dalam pengentasan kemiskinan (Azzahra et al., 2022). Menurut data BPS Provinsi Jawa Timur, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022, yaitu 72,75 meningkat 0,61 poin daripada capaian pada tahun 2021 sebesar 72,14. Peningkatan IPM ini merupakan tertinggi selama tiga tahun terakhir (BPS Provinsi Jawa Timur, 2022). Capaian ini dikarenakan semakin membaiknya kondisi sosial dan ekonomi pasca pandemi dan strategi pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi yang berdampak kepada pos kesehatan dan pendidikan dengan kontribusi pengeluaran pemerintah bagi pembangunan manusia (Rinaldi et al., 2022). Pengukuran ini didasari pada tiga aspek fundamental hidup, yaitu umur panjang, standar hidup layak, dan wawasan. Berikut merupakan grafik indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018-2022.



Gambar 3. Grafik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Menurut Komponen, 2018-2022

Sumber: Berita Statistik (BPS Provinsi Jawa Timur, 2022)

Islam telah mengatur dan memiliki pondasi pada kegiatan sosial ekonomi yang berfokus kepada pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan umatnya. Menurut Ibnu Khaldun, besar kecilnya potensi dari pembangunan ekonomi dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (Mahri et al., 2021). *Maqashid Syariah* menjadi kunci dalam menerapkan tatanan kehidupan dan terdiri dari lima aspek penting, yaitu perlindungan dalam segi agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan (AUDA, 2008). Tujuan utama dari *Maqashid Syariah* sendiri adalah untuk mencapai *falah* (Kemuliaan dunia dan akhirat) dan *maslahah* (kesejahteraan umum). Sehingga tercetuslah obyek dari pengembangan sumber daya manusia untuk menentukan indikator secara terukur dalam menggambarkan pembangunan manusia serta kesejahteraan pada suatu negara yang mayoritas penduduknya Muslim, yaitu *Islamic Human Development Index* (I-HDI) yang disandarkan dengan *Maqashid Syariah* (ANTO, 2009). Selanjutnya, Provinsi Jawa Timur merupakan bagian dari provinsi dengan penduduk muslim terbanyak, menurut data Dukcapil pada tahun 2022, Jawa Timur memiliki penduduk muslim sebesar 40,99 juta dengan porsi 97,21% dari total penduduknya (Kusnandar, 2022). Terlebih dengan faktor budaya di Provinsi Jawa Timur yang lekat dengan ajaran Islam.

Studi mengenai dana desa dan *Islamic Human Development Index* belum banyak

dilakukan, namun beberapa penelitian sebelumnya berkaitan dengan masalah tersebut yang dijadikan sebagai referensi. Studi yang dilakukan oleh (Hermawati et al., 2022) mengenai program dana desa terhadap indeks pembangunan manusia serta dampak yang terjadi terhadap kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Menghasilkan temuan yaitu dana desa berpengaruh positif dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia dan mengurangi tingkat kemiskinan yang dijadikan sebagai variabel mediasi. Selanjutnya, studi lain oleh (Tarmizi & Miksalmina, 2020) mengenai dana desa dan indeks pembangunan manusia terhadap pengentasan kemiskinan. Temuan dari penelitian adalah bahwa dana desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Namun, penelitian lain ada yang berbeda yang dilakukan oleh (Hermawan et al., 2021) bahwa dana desa memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian oleh (Nurlayli & Jumarni, 2022) mengenai penyerapan tenaga kerja dan *Islamic Human Development Index* terhadap kemiskinan menghasilkan bahwa *Islamic Human Development Index* memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan serta penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Selanjutnya, penelitian lain mengenai permasalahan *Islamic Human Development Index* yang dilakukan oleh (Asep Nurhalim et al., 2022) tidak sejalan dengan penelitian (Nurlayli & Jumarni, 2022) bahwa hasil penelitian tersebut adalah *Islamic Human Development Index* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini berfokus penyaluran dana zakat dan *Islamic Human Development Index* dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian lain oleh (Widiastuti et al., 2022) meneliti tentang pengaruh zakat, *Islamic Human Development Index*, dan kualitas tata kelola pemerintahan untuk pengentasan kemiskinan pada 39 negara OKI. Penelitian berhasil menemukan temuan bahwa *Islamic Human Development Index* mendukung adanya pengurangan kemiskinan di negara-negara OKI dengan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan.

Provinsi Jawa Timur memiliki dana desa yang besar setiap tahunnya. Dana desa yang didistribusikan pemerintah melalui APBN masih belum menurunkan kemiskinan di Jawa Timur. Terlebih lagi melihat efek dari pandemi COVID-19 yang cukup serius dan pemerintah memiliki fokus cukup besar untuk memulihkan perekonomian nasional. Provinsi Jawa Timur memiliki penduduk Muslim yang besar sehingga memiliki potensi dalam memberikan solusi untuk pengetasan kemiskinan. *Islamic Human Development Index* melihat indikator dari lima aspek *Maqashid Syariah* yang berhubungan dalam hasil atas dana desa tersebut yang nantinya melihat pengaruh untuk menuntaskan kemiskinan. Selain itu, dalam penelitian ini belum ada yang meneliti lebih lanjut antara hubungan dana desa dengan *Islamic Human Development Index* dalam memberikan studi yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Maka dari itu, penulis ingin membahas lebih dalam terkait pengaruh dana desa dan I-HDI terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur berdasarkan data yang sudah dipublikasikan sehingga menjadi hal yang menarik dalam memberikan solusi untuk menurunkan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Desentralisasi

Pemerintah dalam mengelola keuangan dapat mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah melalui desentralisasi. Menurut (Hendratno, 2009) desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan atau kewenangan untuk mengatur pemerintahan sendiri yang berupa otonomi daerah. Desentralisasi timbul ketika belanja pemerintah daerah lebih rinci dibandingkan dengan belanja pemerintah pusat sehingga menimbulkan output yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dalam efisiensi ekonomi (Iftitah et al., 2022). Kualitas dari sumber daya manusia belum memadai dalam perencanaan desa sehingga mengakibatkan output yang tidak sesuai dengan kebutuhan (Azlina et al., 2017)

Desentralisasi fiskal dalam pengertiannya merupakan pembagian kekuasaan fiskal dan kewenangannya dalam pengambilan keputusan kepada daerah otonom untuk mencapai kesejahteraan dengan optimalisasi pelayanan publik (Widodo, 2017).

Lingkup perspektif desentralisasi sangat luas dengan beberapa perspektif. Perspektif pertama berfokus kepada penyediaan barang publik yang berfokus kepada efisiensi dalam membangun desentralisasi (Widodo, 2017). Perspektif ini mengatur dalam hal menemukan formula yang ideal dalam penyediaan barang publik sesuai dengan kewenangannya. Perspektif selanjutnya merupakan perspektif biaya organisasi yang dikemukakan oleh Breton. Pendapat ini menjelaskan bahwa organisasi pemerintahan harus mencerminkan efisiensi dan sentralisasi atas perbedaan preferensi yang terjadi di masyarakat seluruh wilayah.

Dana Desa

Dana desa dalam pengertiannya merupakan dana APBN yang diberikan untuk desa dan dana tersebut dialokasikan melalui APBD kabupaten/kota untuk pemberdayaan dan pembangunan desa (Sigit & Kosasih, 2020). Penganggaran dana desa dalam APBN ditentukan sebesar 10% yang berasal dari luar dana transfer daerah secara bertahap. Kebijakan dana desa ini memiliki tujuan dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, desa, meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dengan melakukan pembangunan seperti jalan desa, jembatan, pasar desa, air bersih, posyandu, dan lainnya, mengentaskan kemiskinan, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa (Harahap, 2021). Penggunaan dana desa memiliki prinsip yang diterapkan, yaitu di antaranya: (Potabuga, 2022)

1. Keadilan: mengutamakan kepentingan dan hak untuk seluruh masyarakat desa
2. Partisipatif: Adanya partisipasi aktif dari masyarakat dengan mengutamakan prakarsa dan kreativitas
3. Kewenangan desa: Mengutamakan kewenangan lokal berskala desa
4. Prioritas dalam Kebutuhan: Mengutamakan kepentingan yang krusial terkait masyarakat desa
5. Tipologi desa: Adanya pertimbangan dalam kondisi geografis, ekonomi, ekologi, sosiologis, antropologis desa yang menjadi ciri khas dan perkembangan kemajuan desa tersebut
6. Pengadaan sendiri dengan basis sumber daya desa: Memprioritaskan pelaksanaan

desa secara mandiri dan mengutamakan keterampilan masyarakat desa itu sendiri. Terdapat formulasi pengalokasian dana desa pada Tahun 2022 yang dapat dibagi menjadi empat formulasi alokasi, yaitu: (Humas DJPK Kemenkeu, 2021)

1. Alokasi Dasar: berdasarkan klaster jumlah penduduk yang dibagi dalam tujuh klaster
2. Alokasi Formula: berdasarkan jumlah penduduk desa 10%, angka penduduk miskin 40%, luas wilayah desa 10%, dan geografis desa 40%
3. Alokasi Afirmasi: ditujukan untuk desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak
4. Alokasi Kinerja: ditujukan kepada desa yang memiliki kinerja terbagus

Teori Pembangunan Ekonomi Islam

Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam memiliki definisi sebagai kemajuan dan keseimbangan dalam sisi materi dan non-materi yang berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan manusia (Mahri et al., 2021). Dalam pengertian ini, cerminan atas proses pembangunan multidimensi yang termasuk dalam hal meningkatkan kemakmuran, reorientasi, dan reorganisasi atas keseluruhan sistem sosial, ekonomi, dan spritualitas (Sadeq, 2006). Tujuan pembangunan dalam perspektif Islam adalah tujuan untuk hal duniawi serta akhirat (*falah*) yang melindungi dari sisi agama, akal, kehidupan, keturunan, serta harta. Perspektif pembangunan ekonomi dalam Islam harus mengikuti *Maqashid Syariah* yang sangat penting untuk mencapai *falah*. Pandangan Islam pada pembangunan memfokuskan pada kesejahteraan manusia dan keadilan sosial. Maka dari itu, pembangunan berpusat pada tujuan tertinggi, yaitu *Maqashid Syariah* yang terdiri atas tujuan dasar. Tujuan dasar tersebut adalah pendidikan individu, keadilan sosial, dan memberikan jaminan kesejahteraan (Mahri et al., 2021).

Islamic Human Development Index (I-HDI)

Islamic Human Development Index (I-HDI) merupakan konsep yang diperkenalkan secara global oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui penelitian dalam pembangunan manusia pada

Tahun 1990 (Aydin, 2017). Konsep ini menjadi dasar dalam pengukuran dan perhitungan negara dengan penduduk muslim yang mayoritas. I-HDI menjadi inovasi baru yang disandarkan kepada *Maqashid Syariah* (Aiu Viollani et al., 2022). Adapun pengukuran I-HDI dibentuk atas konsep *Maqashid Syariah* yang terdiri lima aspek menurut Jasser Auda, yaitu: agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*). Indikator ini dipilih berdasarkan teori yang masuk akal yang memiliki hubungan antara indikator dan dimensi yang akan dikembangkan (AUDA, 2008).

Konsep pengukuran *Islamic Human Development Index* (I-HDI) berbeda dengan konsep Indeks Pembangunan Manusia dalam konvensional. Komponen dalam pengukuran IPM masih bersifat *dharuriyat* atau primer, yaitu dalam hal tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita. I-HDI ditambahkan dengan indeks religiusitas, yaitu *hifz al din*. Adanya pengukuran ini, dapat memberikan pengembangan yang luas dan menyeluruh terhadap pola pembangunan khususnya dengan mayoritas muslim. I-HDI membagi kesejahteraan dalam dua jenis, yaitu kesejahteraan material dan kesejahteraan non-material.

Berikut merupakan tabel terhadap dimensi I-HDI yang masuk ke dalam indikator yang relevan:

Tabel 1. Indikator I-HDI

| Dimension | Indicators | Data |
|-----------|-----------------------------------|--|
| Religion | Worship | Zakah collection/GDP |
| | Morals (negative) | Number of crimes/total population Corruption Perception Index |
| Life | Life expectancy | Life expectancy rate |
| | Employment opportunity | Unemployment rate |
| | Freedom | Democracy index |
| | Basic needs provision | Poverty rate Average expenditure |
| Intellect | Access to educational institution | Number of school/population |
| | Educational outcomes | Literacy rate |
| Family | Positive | Fertility rate |
| | Negative | Divorce rate Infant mortality rate |
| Wealth | Wealth ownership | GDP per capita |
| | Wealth growth | Economic growth rate |
| | Wealth distribution | Gini ratio |

Sumber: Buku Ekonomi Pembangunan Islam KNEKS (Mahri et al., 2021)

Tabel di atas merupakan tabel dimensi dan indikator dari terbentuknya *Islamic Human Development Index* yang termasuk dalam kategori positif dan sisanya termasuk dalam kategori perlindungan preventif (Mahri et al.,

2021). Indeks yang dibentuk adalah untuk menentukan posisi perkembangan manusia pada provinsi-provinsi di Indonesia. Terdapat studi yang berbeda antara posisi untuk komposisi I-HDI dan HDI. Namun, kedua indeks ini memiliki asumsi dalam hubungan positif dalam menentukan peringkat I-HDI.

Setelah mengetahui pengukuran kesejahteraan dalam Islam, berikut penjelasan dalam lima konsep *Maqashid Syariah* dalam *Islamic Human Development Index*:

1. Agama (*Hifdz Ad-Dien*)

Hifdz ad-Dien merupakan aspek *Maqashid Syariah* dalam agama sebagai kebutuhan manusia yang berusaha mengarahkan keyakinan dan membangun kualitas etika manusia (Nurlayli & Jumarni, 2022). Agama menjadi prioritas utama manusia untuk menjalankan kehidupan dan spritualitas dalam hidupnya. Selain itu, agama dapat memberikan arti hidup, arahan pada manusia, dan merubah individu menjadi manusia terbaik melalui perubahan perilaku dan sikap terhadap diri sendiri serta lingkungannya (Ali Rama, 2019). Indikator yang dapat dijadikan tolak ukur I-HDI, yaitu berdasarkan pada ibadah dan akhlak. Dalam ibadah diwakili oleh pengumpulan ZIS oleh Muslim. Sedangkan, akhlak merujuk pada perilaku baik dan buruk dengan mengambil aspek negatif, yaitu tingkat kriminalitas. Angka kriminalitas merupakan suatu cerminan pada salah satu ibadah dalam rukun Islam, yaitu sholat (Nurlayli & Jumarni, 2022). Dalam mengukur tingkat kriminalitas terdapat rumus, yaitu sebagai berikut: (Asep Nurhalim et al., 2022)

$$ID = \frac{\text{nilai aktual kriminalitas} - \text{nilai kriminalitas terendah}}{\text{nilai kriminalitas tertinggi} - \text{nilai kriminalitas terendah}}$$

Keterangan:

ID : Indeks *Ad-Dien*

2. Jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Al-Shatibi menjelaskan pemeliharaan kehidupan dapat dicapai melalui tiga cara, yaitu kebutuhan untuk memiliki keturunan, memastikan kelangsungan hidup dengan makan dan minum, serta tersedia tempat berlindung dan pakaian. Menurut Amin (2015), perlindungan jiwa didefinisikan melalui tiga cara, yaitu kebutuhan fisik dan biologis manusia, kebutuhan spiritual dan

psikologis, serta kebutuhan intelektual melalui pendidikan (Ali Rama, 2019). Dalam pemenuhan kebutuhan dasar direpresentasikan oleh angka harapan hidup. Indikator yang digunakan sebagai tolak ukur ini mencerminkan komponen untuk kesejahteraan manusia. Rumus perhitungan yang digunakan adalah: (Asep Nurhalim et al., 2022)

$$INF = \frac{\text{nilai aktual angka harapan hidup} - \text{nilai angka harapan hidup terendah}}{\text{nilai angka harapan hidup tertinggi} - \text{nilai angka harapan hidup terendah}}$$

Keterangan:

INF : Indeks *An-Nafs*

3. Akal (*Hifdz Al-Aql*)

Menurut (Chapra, 2008), akal merupakan suatu ciri khas yang dimiliki manusia dan perlu untuk meningkatkan pengetahuan secara terus menerus yang bertujuan untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan manusia. Selain itu, menurut (Ashur & El-Mesawi, 2006) pemeliharaan akal merupakan sebuah perlindungan dari sesuatu yang dapat menghancurkan akal manusia. Maka dari itu, untuk memperkuat akal melalui pendidikan dan eksplorasi langsung (Ali Rama, 2019). Indikator yang menjadikan pemeliharaan akal sebagai tolak ukur adalah dengan jumlah angka harapan lama sekolah yang ditunjukkan dengan rumus berikut: (Asep Nurhalim et al., 2022)

$$IA = \frac{1}{2} (\text{angka harapan lama sekolah}) + \frac{1}{3} (\text{rata-rata lama sekolah})$$

Keterangan:

IA : Indeks *Al-Aql*

4. Keluarga (*Hifdz An-Nasl*)

Menurut (Chapra, 2008), jika generasi selanjutnya secara fisik, mental, spritual lemah, dan kualitas yang rendah maka tidak ada zaman yang akan bertahan. Oleh karena itu, keluarga merupakan pendidikan pertama untuk moral anak-anak yang perlu ditingkatkan dalam segi membangun kualitas dengan memainkan peran penting dalam keberlanjutan pembangunan. Indikator dalam pemeliharaan keturunan diperkenalkan dengan tiga indikator, yaitu angka kelahiran, angka kematian bayi, dan angka perceraian. Keberlanjutan generasi mendatang dilihat dengan tingkat kesuburan yang tinggi. Sebaliknya, angka perceraian dan angka kematian bayi dalam rumah tangga

dapat mengancam stabilnya atas kelangsungan hidup manusia (Ali Rama, 2019). Pengukuran indikator pemeliharaan keturunan dapat dirumuskan dalam rumus berikut: (Asep Nurhalim et al., 2022)

$$INS = \frac{\text{nilai aktual laju pertumbuhan penduduk} - \text{nilai terendah laju pertumbuhan penduduk}}{\text{nilai tertinggi laju pertumbuhan penduduk} - \text{nilai terendah laju pertumbuhan penduduk}}$$

Keterangan:

INS : Indeks *An-Nasl*

5. Harta (*Hifdz Al-Maal*)

Harta merupakan amanah dari Allah SWT yang perlu dimanfaatkan dan dikembangkan secara jujur untuk menghapus kemiskinan, memenuhi kebutuhan sesama, dan pemerataan pendapatan dan kekayaan (Chapra, 2008). Islam menekankan pentingnya harta sebagai bentuk dari distribusi kekayaan untuk masyarakat sebagai salah satu cara mencapai *falah* atau kebaikan. Harta sebagai penunjang dasar pembangunan dari segala aspek seperti spritual, akhlak, dan fisik (Ali Rama, 2019). Indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk pemeliharaan harta ada tiga indikator, yaitu pendapatan per kapita (GDP), pertumbuhan ekonomi, dan rasio gini yang mewakili dalam distribusi pendapatan yang berasal dari ZISWAF (zakat, infaq, dan shadaqah). Mengukur *hifdz al-maal* dilihat dari orang miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan esensial. Maka dari itu, untuk mewujudkan hal tersebut dengan indikator persentase penduduk miskin yang dirumuskan dalam rumus berikut: (Asep Nurhalim et al., 2022)

$$PGI = \frac{\text{nilai aktual PGI} - \text{nilai terendah PGI}}{\text{nilai tertinggi PGI} - \text{nilai terendah PGI}}$$

$$CEI = \frac{\text{nilai aktual CEI} - \text{nilai terendah CEI}}{\text{nilai tertinggi CEI} - \text{nilai terendah CEI}}$$

$$IM = \frac{1}{2} (PGI + CEI)$$

Keterangan:

PGI : Pendapatan perkapita penduduk

CEI : Indeks kedalaman kemiskinan

IM : Indeks *Al-Maal*

Sehingga I-HDI dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\underline{\underline{IHD I = (2/6 (ID) + 1,6 (INF + IA + INS + IM)) \times 100\%}}$$

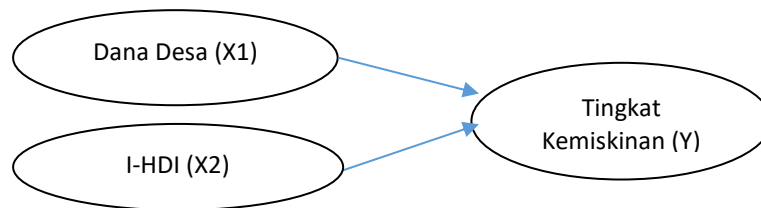
Teori Kemiskinan

Konsep dasar dalam kemiskinan memiliki banyak pengertian, salah satu pengertian mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya (Mahri et al., 2021). Dalam teori ekonomi klasik yang dikembangkan pada abad ke-18 dan 19 yang diusulkan oleh Adam Smith dan David Ricardo, mengasumsikan bahwa terdapat hasil dari pertukaran yang terjadi pada pasar dan dikarenakan oleh upah yang mencerminkan produktivitas individu. Kemiskinan dicerminkan oleh akibat dari pilihan individu yang buruk yang memengaruhi produktivitas secara negatif (Davis et al., 2015).

Selanjutnya, menurut *The World Bank* kemiskinan merupakan metode umum yang digunakan dalam mengukur kemiskinan yang didasarkan pada tingkat pendapatan atau konsumsi (Davis et al., 2015). Seseorang yang dianggap “miskin” jika dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup memiliki pendapatan yang di bawah tingkat minimum. Kemiskinan memiliki penyebab yang menjadi faktor utama yang menyebabkan kemiskinan tersebut. Menurut (Spicker, 2002), terdapat empat faktor utama terjadinya kemiskinan, yaitu: *Individual explanation* (kemiskinan yang berasal dari kepribadian manusia itu sendiri), *Familial explanation* (kemiskinan yang terjadi diakibatkan oleh faktor keturunan yang disebabkan oleh ketidakmampuan memberikan pendidikan yang layak untuk keturunannya), *Subcultural explanation* (kemiskinan yang terjadi oleh adat istiadat setempat, dan *Structural explanation*, merupakan kemiskinan yang diakibatkan oleh kesenjangan atas perbedaan status

Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian adalah dasar dalam penelitian yang memuat atas dasar pemikiran antara teori dengan observasi, kajian kepustakaan, dan fakta pada penelitian. Hal ini dijelaskan dengan model konseptual sebagai teori yang dikaitkan dengan faktor yang dijadikan sebagai masalah penting. Berikut merupakan kerangka pikir dari penelitian ini.



Gambar 4. Kerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atas perumusan masalah pada penelitian. Teori desentralisasi menjadi acuan teori dalam dana desa, seperti studi yang dilakukan oleh (Hermawan et al., 2021) dan (Rachman et al., 2023) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan, penelitian yang (Hermawati et al., 2022) memiliki temuan berbeda dengan hasil penelitian bahwa dana desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selanjutnya, peningkatan dana desa akan menurunkan tingkat kemiskinan dilihat dengan keberhasilan kebijakan pemerintah daerah tersebut. Sehingga, dengan hasil penelitian terdahulu bahwa dana desa memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan dengan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Dana desa memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur

Teori selanjutnya mengenai teori pembangunan Islam yang menjadi acuan teori dalam *Islamic Human Development Index* dengan didukung penelitian oleh (Nurlayli & Jumarni, 2022) dan (Widiastuti et al., 2022) dengan hasil bahwa *Islamic Human Development Index* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun, terdapat penemuan berbeda oleh (Asep Nurhalim et al., 2022) yang memiliki hasil penelitian bahwa variabel I-HDI tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, peningkatan sumber daya manusia melalui *Islamic Human Development Index* dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sehingga dengan hasil penelitian terdahulu mengemukakan bahwa *Islamic Human Development Index* memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan dengan hipotesis sebagai berikut:

- H2: *Islamic Human Development Index* (I-HDI) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena pelaksanaan penelitian ini meliputi aspek data, analisis, dan interpretasi data yang sudah diperoleh. Penelitian kuantitatif merupakan sebuah metode dalam menghubungkan antar variabel dengan menguji teori-teori tertentu (Creswell, 2009). Variabel-variabel diujikan menggunakan instrumen penelitian yang terdiri dari angka-angka yang dapat dianalisis menggunakan prosedur statistik (Kusumastuti et al., 2020). Variabel dalam penelitian ini adalah terdapat variabel independen, yaitu dana desa (X1) dan *Islamic Human Development Index* (X2) dan variabel dependen, yaitu tingkat kemiskinan (Y).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan kurun waktu tahun 2018-2022 berupa data panel yang merupakan gabungan data *cross section* dan *time series*. Sumber data penelitian ini berasal dari BPS Provinsi Jawa Timur, DJPK Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), jurnal, buku, dan media elektronik lainnya. Pengolahan data dan hasil estimasi model analisis pada penelitian ini menggunakan *Microsoft Excel* dan *E-Views*.

Penelitian ini menggunakan data alokasi dana desa Provinsi Jawa Timur yang berasal dari *website* DJPK Kementerian Keuangan RI untuk variabel X1. Untuk variabel X2 menggunakan indikator untuk mengukur indeks pembangunan manusia berdasarkan 5 dimensi *Maqashid Syariah* dengan menggunakan data angka jumlah kriminalitas, angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, laju pertumbuhan penduduk,

pendapatan perkapita penduduk, dan indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Variabel Y merupakan tingkat kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup dengan menggunakan data persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022.

Penelitian ini mencakup semua kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan penggabungan data *time series* dan *cross section* tahun 2018-2022 pada 29 kabupaten di Provinsi Jawa Timur sehingga menghasilkan 145 observasi. Data yang akan menjadi objek penelitian adalah data dana desa periode 2018-2022 untuk Provinsi Jawa Timur dan *Islamic Human Development Index* (I-HDI) dengan menggunakan lima dimensi *Maqashid Syariah* dengan menghitung masing-masing indeksnya, yaitu:

1. Indeks *Ad-Dien*: jumlah kriminalitas
2. Indeks *An-Nafs*: angka harapan hidup
3. Indeks *Al-Aql*: angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah
4. Indeks *An-Nasl*: laju pertumbuhan penduduk
5. Indeks *Al-Maal*: penduduk perkapita dan indeks kedalaman kemiskinan

Selanjutnya, untuk data tingkat kemiskinan menggunakan data persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Analisis data yang akan dilakukan adalah menggunakan teknik analisis regresi data panel untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh dana desa (X1) dan I-HDI (X2) terhadap tingkat kemiskinan (Y) selama periode waktu tertentu. Sebelum mengestimasi data, pengujian data panel diperlukan untuk memilih metode yang sesuai dengan model yang digunakan. Beberapa teknik yang ditawarkan untuk mengestimasi parameter yaitu, CEM (*Common Effect Model*), FEM (*Fixed Effect Model*), dan REM (*Random Effect Model*) (Nandita et al., 2019). Pemilihan teknik ini dapat menentukan model yang cocok dengan menggunakan uji *Chow* dan Uji *Hausman*. Teknik analisis regresi berganda dapat dirumuskan dengan persamaan berikut:

$$Y_{it} = a + bX_{1it} + bX_{2it} + e_{it}$$

Y_{it} = Tingkat kemiskinan

X_{1it} = Dana desa

X_{2it} = *Islamic Human Development Index* (I-HDI)

a = Konstanta

b = Koefisien kemiringan untuk semua unit

e_{it} = Standard error pada unit data tabel silang ke-i dan waktu ke-t

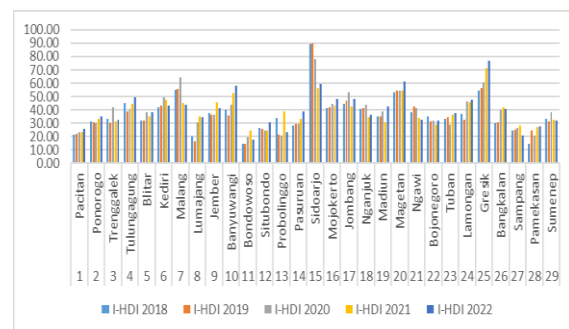
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Hasil perhitungan I-HDI didapatkan dari menghitung aspek *Maqashid Syariah* yang sesuai dengan indikator dalam I-HDI dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{I-HDI} = 2/6 (\text{ID}) + 1/6 (\text{INF} + \text{IA} + \text{INS} + \text{IM}) \times 100\%$$

Berikut merupakan hasil perhitungan I-HDI di Provinsi Jawa Timur periode 2018-2022 dalam bentuk grafik:



Gambar 5. Grafik I-Hdi Kabupaten Di Jawa Timur 2018-2022 (Data Diolah)

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan I-HDI pada setiap wilayah di Jawa Timur dari 2018-2022. Dilihat dari persentase setiap tahunnya, hanya sedikit wilayah yang memiliki I-HDI di atas 50%. Kabupaten dengan I-HDI tertinggi terdapat di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 sebesar 89,93% dan kabupaten dengan I-HDI terendah pada Kabupaten Bondowoso tahun 2019 sebesar 14,20%.

Hasil Estimasi Model

Pengujian dilakukan dengan estimasi data panel antara dana desa dan *Islamic Human Development Index* terhadap kemiskinan,

berikut merupakan hasil estimasi model tersebut:

1) *Common Effect Model*

Tabel 2. Hasil Estimasi Common Effect Model

| Variabel | Common Effect Model | | |
|----------|---------------------|-------------|--------|
| | Coefficient | t-statistic | Prob. |
| C | 17.67285 | 14.50011 | 0.0000 |
| DD | 0.011457 | 3.258440 | 0.0014 |
| IHDI | -11.28075 | -6.630866 | 0.0000 |

Sumber: Pengolahan data (2023)

Pada tabel di atas memperlihatkan hasil estimasi dari *Common Effect Model*. Variabel dana desa memiliki koefisien sebesar 0,011457 dengan probabilitas 0,0014 yang berarti nilai tersebut < 0,05 dengan hasil yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan, untuk variabel *Islamic Human Development Index* memiliki koefisien sebesar -11.28075 dengan probabilitas 0,0000 yang berarti nilai tersebut < 0,05 dengan hasil memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur periode 2018-2022.

2) *Fixed Effect Model*

Tabel 3. Hasil Estimasi Fixed Effect Model

| Variabel | Fixed Effect Model | | |
|----------|--------------------|-------------|--------|
| | Coefficient | t-statistic | Prob. |
| C | 14.32725 | 22.57712 | 0.0000 |
| DD | -0.005593 | -2.796654 | 0.0061 |
| IHDI | -0.323159 | -0.464918 | 0.6429 |

Sumber: Pengolahan data (2023)

Berdasarkan tabel di atas, memperlihatkan hasil estimasi dari *Fixed Effect Model*. Dapat disimpulkan bahwa pada variabel dana desa memiliki koefisien sebesar -0,005593 dengan probabilitas 0,0061 yang berarti nilai tersebut < 0,05. Hasil ini menjadikan variabel dana desa memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selanjutnya, variabel *Islamic Human Development Index* memiliki koefisien sebesar -0.323159 dengan nilai probabilitas 0,6429 yang berarti nilai tersebut > 0,05. Hasil ini menjadikan variabel *Islamic Human Development Index* memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap

tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur periode 2018-2022.

3) *Random Effect Model*

Tabel 4. Hasil Estimasi Random Effect Model

| Variabel | Random Effect Model | | |
|----------|---------------------|-------------|--------|
| | Coefficient | t-statistic | Prob. |
| C | 14.35984 | 18.36868 | 0.0000 |
| DD | -0.004577 | -2.385950 | 0.0184 |
| IHDI | -0.248304 | -0.364763 | 0.7158 |

Sumber: Pengolahan data (2023)

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan hasil estimasi dari *random effect model*. Dapat disimpulkan bahwa variabel dana desa memiliki koefisien sebesar -0,004577 dengan probabilitas 0,0184 yang berarti nilai probabilitas tersebut < 0,05. Hasil ini menjadikan variabel dana desa memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selanjutnya, pada variabel *Islamic Human Development Index* memiliki koefisien sebesar -0.248304 dengan probabilitas 0,7158 yang berarti nilai probabilitas > 0,05. Hasil ini menjadikan variabel *Islamic Human Development Index* memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur periode 2018-2022.

Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk membandingkan model *common effect model* dan *fixed effect model*. Jika nilai probabilitasnya < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Sebaliknya, jika nilai probabilitasnya > 0,05 maka Ha ditolak dan H0 diterima. Berikut tabel dari hasil uji chow:

Tabel 5. Hasil Uji Chow

| Effect Test | Statistic | d.f | Prob. |
|--------------------------|------------|----------|--------|
| Cross-section F | 178.680394 | (28.113) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 552.848797 | 28 | 0.0000 |

Sumber: Pengolahan data (2023)

Berdasarkan hasil uji chow di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 maka metode yang terpilih adalah menggunakan *fixed effect model*.

Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk membandingkan *fixed effect model* dan *random effect model* sehingga terpilihnya model terbaik untuk digunakan. Jika nilai probabilitasnya < 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak. Sebaliknya, jika nilai probabilitasnya > 0,05 maka Ha ditolak H0 diterima. Berikut adalah tabel dari hasil uji hausman:

Tabel 6. Hasil Uji Hausman

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq d.f | Prob. |
|----------------------|-------------------|------------|--------|
| Cross-section random | 14.670273 | 2 | 0.0007 |

Sumber: Pengolahan data (2023)

Berdasarkan hasil uji hausman pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas < 0,05 dengan Ha diterima dengan pengertian bahwa model yang digunakan adalah *fixed effect model*. Maka metode terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik, yaitu uji normalitas menggunakan uji *Jarque-Bera*. Hasil pengujian disimpulkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,098105 yang lebih besar dari 0,05. Maka dari itu, hasil ini menandakan bahwa data penelitian terdistribusi normal. Selanjutnya uji multikolinearitas diketahui bahwa nilai koefisien korelasi kedua variabel < 0,9 yang dapat disimpulkan bahwa tidak mengalami multikolinearitas.

Pengujian Hipotesis Persamaan Regresi

Tabel 7. Persamaan Regresi

| Variabel | <i>Fixed Effect Model</i> | | |
|----------|---------------------------|-------------|--------|
| | Coefficient | t-statistic | Prob. |
| C | 14.32725 | 22.57712 | 0.0000 |
| DD | -0.005593 | -2.796654 | 0.0061 |
| IHDI | -0.323159 | -0.464918 | 0.6429 |

Sumber: Pengolahan data (2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai C (*Constant*) senilai

14,32725, variabel dana desa -0,005693, dan variabel *Islamic Human Development Index* - 0,186517. Sehingga dengan hasil ini dapat dituliskan dengan persamaan regresi pada penelitian ini, yaitu:

$$Y_{it} = 14,32725 - 0,005693X_1 - 0.323159X_2$$

Uji T

Uji T digunakan untuk menghitung variabel independen dalam menerangkan variabel dependen yang akan menghasilkan kesimpulan apakah ada pengaruh dari masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Uji T dikaitkan dengan tingkat signifikansi dengan nilai 0,05. Jika nilai tersebut < 0,05 maka hasilnya akan signifikan, sebaliknya jika nilai > 0,05 maka nilai tidak signifikan.

Tabel 8. Hasil Uji T

| Variabel | <i>Fixed Effect Model</i> | | |
|----------|---------------------------|-------------|--------|
| | Coefficient | t-statistic | Prob. |
| C | 14.32725 | 22.57712 | 0.0000 |
| DD | -0.005593 | -2.796654 | 0.0061 |
| IHDI | -0.323159 | -0.464918 | 0.6429 |

Sumber: Pengolahan data (2023)

Berdasarkan hasil dari *Fixed Effect Model* di atas dapat disimpulkan bahwa hasil koefisien regresi untuk variabel dana desa sebesar -0,005593. Dengan demikian terdapat pengaruh negatif dana desa terhadap kemiskinan. Selanjutnya, pada variabel I-HDI sebesar -0.323159 maka dari hasil tersebut terdapat pengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Nilai signifikansi pada variabel dana desa, yaitu 0.0061 dengan arti bahwa nilai signifikansinya < 0,05 yang disimpulkan bahwa hasil signifikan. Pada variabel I-HDI, nilai signifikansi sebesar 0.6429 yang berarti nilai lebih kecil dari 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa tidak berpengaruh secara signifikan I-HDI terhadap kemiskinan. Sehingga hasil dari uji signifikansi adalah pada variabel dana desa memiliki pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan dan variabel *Islamic Human Development Index* tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Uji F

Uji koefisien regresi secara simultan disebut dengan uji F. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bagaimana masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Uji F digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah variabel dana desa dan I-HDI berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur antara tahun 2018-2022 yang akan disajikan dengan hasil pada tabel berikut:

Tabel 9. Hasil Uji F

| Test Summary | Hasil |
|-------------------|----------|
| F-statistic | 257.0781 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 |

Sumber: Pengolahan data (2023)

Berdasarkan hasil di atas, diketahui Prob (*F-statistic*) sebesar 0,000000, nilai tersebut < 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (dana desa dan I-HDI) berpengaruh terhadap kemiskinan.

Koefisien Regresi

Pengaruh variabel dependen dalam menjelaskan keseluruhan variabel independen dinilai dengan menggunakan koefisien regresi. Tabel berikut menampilkan persentase untuk angka koefisien regresi:

Tabel 10. Koefisien Regresi

| Test Summary | Hasil |
|--------------------|----------|
| R-squared | 0.986019 |
| Adjusted R-squared | 0.982184 |

Sumber: Pengolahan data (2023)

Berdasarkan pada tabel di atas, diperoleh angka R sebesar 0.982184 Hal ini menunjukan bahwa adanya hubungan yang tinggi antara variabel dana desa dan I-HDI terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Sedangkan, hasil dari R-squared, yaitu 0.986019 yang berarti 98,6% variabel kemiskinan dipengaruhi oleh dana desa dan I-HDI. Sementara itu, sisa dari hasil tersebut dipengaruhi oleh variabel model lain di luar dari penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa dana desa memiliki nilai negatif dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur pada 2018-2022. Nilai koefisien pada dana desa sebesar - 0,005593 dan tingkat probabilitas sebesar 0,0061 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan dana desa sebesar 1% menurunkan kemiskinan sebesar 0,005593%. Hasil ini sesuai dengan hipotesis bahwa variabel dana desa berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hasil ini sesuai dengan penelitian lain yang dilakukan oleh (Kawulur et al., 2019), (Hermawan et al., 2021), dan (Dewi et al., 2018).

Berkaitan dengan hasil ini, kemampuan dana desa dalam menurunkan kemiskinan masih terbelang belum signifikan. Namun, dalam penelitian ini dapat menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah dapat menjadi solusi dalam menurunkan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Dana desa yang didistribusikan di Jawa Timur setiap tahunnya bertambah walaupun tidak signifikan. Hal ini dapat terlihat dari data-data pendukung yang ada. Pemakaian dana desa dapat digunakan dalam pembangunan desa yang memiliki kebijakan dalam menurunkan kemiskinan sesuai dengan kearifan lokal pada desa tersebut. Hal ini juga sesuai dengan penelitian lain oleh (Dewi et al., 2018) pembangunan dalam wilayah pedesaan dapat menjadi solusi persoalan ekonomi dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan serta menciptakan kebijakan pembangunan berbasis pedesaan yang mampu menopang wilayah perkotaan.

Implikasi dari hasil temuan ini adalah data yang dipakai hanya sebatas pada anggaran dana desa saja untuk kabupaten. Pembagian secara formula alokasi dana desa tidak dispesifikasikan dalam penelitian ini. Formula dana desa memiliki permasalahan tersendiri dimana formula yang dibuat tidak mendukung penurunan kemiskinan secara tajam dikarenakan hanya 10 persen mempengaruhi distribusi (Hermawati et al., 2022). Dana desa yang didistribusikan adalah berdasarkan jumlah desa bukan berdasarkan jumlah

penduduk miskin. Sehingga, perlu digali dan dikembangkan kembali dari berbagai aspek formula alokasi dana desa untuk disesuaikan dengan tujuan pemakaian dari dana desa tersebut.

Provinsi Jawa Timur memiliki dana desa yang cukup besar dan hal ini harus menjadi tanggapan yang serius bahwa dana desa yang telah diberikan belum mampu menurunkan kemiskinan di Jawa Timur. Maka dari itu, perlu memaksimalkan dana desa yang dialokasikan dengan memperhatikan kebutuhan pada masing-masing desa. Lalu, dana desa juga harus dipastikan jika dana tersebut sesuai dengan yang diprioritaskan dan tidak terkendala dengan dana yang dikorupsi sehingga akan menimbulkan kerugian. Seperti dalam penelitian oleh (Hermawati et al., 2022) perlu adanya sinkronisasi dan transparansi dalam pelaporan pengelolaan dana desa sehingga pemakaian dana desa sudah tepat dan tidak salah sasaran.

Pengaruh *Islamic Human Development Index* terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa I-HDI memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur pada 2018-2022. Nilai koefisien pada I-HDI sebesar -0,323159 dan tingkat probabilitas sebesar 0,6429 yang lebih besar dari 0,05. Dengan hasil ini, menunjukkan apabila variabel I-HDI meningkat satu satuan maka menurunkan kemiskinan sebesar 0,323159. Hasil ini menolak hipotesis awal bahwa I-HDI berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian oleh (Asep Nurhalim et al., 2022) memiliki hasil

penelitian yang sama dimana I-HDI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Serta hasil ini juga tidak menunjukkan hasil yang sama oleh (Nurlayli & Jumarni, 2022) dan (Widiastuti et al., 2022).

Islamic Human Development Index memiliki indeks yang sangat kompleks meliputi seluruh aspek kehidupan. Hal ini terkadang tidak dapat memiliki pengaruh yang besar dalam mengikuti konsep untuk kemiskinan. Hal ini juga terjadi dalam penelitian oleh (Rahim et al., 2022) yang menyatakan bahwa tingkat kemiskinan belum bisa menjelaskan dalam variabel I-HDI dalam aspek indeks *Al-Maal*. Tentu saja permasalahan ini memiliki dampak yang terjadi sesuai dengan fakta yang ada bahwa dari setiap indeks dalam I-HDI masih terbilang memiliki nilai yang kecil dalam menemukan solusi untuk tingkat kemiskinan, walaupun I-HDI dalam pengaruhnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Implikasi dari hasil temuan ini adalah kontribusi pada setiap dimensi memiliki nilai skor yang berbeda. Temuan pada beberapa kabupaten memiliki hubungan yang kuat dalam satu dimensi, tetapi lemah pada dimensi lain. Serta secara keseluruhan, bahwa angka I-HDI masih banyak yang di bawah 50% sebagai standar dari indeks yang menjadikan kabupaten di Provinsi Jawa Timur memiliki kinerja yang buruk dalam memperkuat kesejahteraan manusia dalam lima aspek Maqashid Syariah. Hal ini juga sesuai dengan teori pada I-HDI yang dikemukakan oleh Rama dan Yusuf dalam buku (Mahri et al., 2021).

Tabel 11. Hipotesis Penelitian

| Hipotesis | Keterangan | Jalur |
|-----------|--|--------|
| H1 | Variabel Dana Desa mempengaruhi Tingkat Kemiskinan | X1 → Y |
| H2 | Variabel I-HDI tidak mempengaruhi Tingkat Kemiskinan | X2 → Y |

Sumber: Data Penelitian (2023)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan mengenai pengaruh dana desa dan *Islamic Human*

Development Index terhadap tingkat kemiskinan, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal. Penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan data dana desa dan *Islamic Human Development Index* di Provinsi Jawa Timur pada periode 2018-2022. Hasil

penelitian yang ditemukan adalah dana desa memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Nilai koefisien pada dana desa sebesar -0,005593 dan tingkat probabilitas sebesar 0,0061 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan dana desa sebesar 1% menurunkan kemiskinan sebesar 0,005593%. Sedangkan, *Islamic Human Development Index* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Nilai koefisien pada I-HDI sebesar -0,323159 dan tingkat probabilitas sebesar 0,6429 yang lebih besar dari 0,05. Dengan hasil ini, menunjukkan apabila variabel I-HDI meningkat satu satuan maka menurunkan kemiskinan sebesar 0,323159.

Terkait dengan penemuan dalam penelitian ini, penggunaan dana desa pada kabupaten di Jawa Timur dapat menuntaskan kemiskinan dengan kebijakan yang sesuai dengan kearifan lokal pada desa tersebut. Pengalokasian dana desa dapat dimaksimalkan dengan memperhatikan kebutuhan pada masing-masing desa sehingga dana tersebut tepat sasaran dan tidak dikorupsi oleh oknum-oknum terkait yang dapat merugikan. Selanjutnya, *Islamic Human Development Index* belum bisa menjelaskan terkait dengan besarnya pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Dengan temuan pada hasil I-HDI yang masih terbilang rendah pada kabupaten di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan masih terdapat perbedaan yang mencolok antara satu dimensi dengan dimensi lainnya. Sehingga perlu diperkuat dalam seluruh aspek Maqashid Syariah untuk dapat menurunkan kemiskinan di Jawa Timur.

Saran

Penelitian ini semata-mata menjelaskan bagaimana indeks pembangunan manusia dalam Islam dan dana desa berdampak pada tingkat kemiskinan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji isu-isu utama dalam pendanaan desa untuk mengurangi kemiskinan secara lebih rinci dan perlu diteliti lebih lanjut dengan mengacu pada *Islamic Human Development Index* sebagai salah satu indikator dalam menurunkan kemiskinan. Selain itu, dalam membangun desa di Indonesia, sinkronisasi dan transparansi dana

desa sangat diperlukan dalam hal pengawasan. Pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan dana desa untuk membiayai pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menurunkan kemiskinan.

IMPLIKASI

1. Data dana desa yang dipakai hanya sebatas pada anggaran dana desa pada kabupaten saja
2. Kontribusi pada setiap dimensi dalam variabel *Islamic Human Development Index* memiliki nilai skor yang berbeda.

KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini masih ada banyak keterbatasan penelitian, diantaranya adalah: (1) Tidak semua data variabel terkait dengan *Islamic Human Development Index* tersedia pada sumber-sumber yang dituju, hanya menyajikan data secara garis besar dan tidak secara detail. (2) Belum banyak yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penelitian ini, sehingga hasil penelitian ini disesuaikan dengan hasil sesungguhnya dan rujukan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiu Viollani, K., Siswanto, S., & Suprayitno, E. (2022). Pengaruh *Islamic Human Development Index* dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dengan pengangguran sebagai variabel intervening. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5233–5244.
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1855>
- Ali Rama, A. R. (2019). Construction of *Islamic Human Development Index*. *Journal of King Abdulaziz University Islamic Economics*, 32(1), 43–64.
<https://doi.org/10.4197/Islec.32-1.3>
- Asep Nurhalim, Mawarni, L., & Resfa Fitri. (2022). Pengaruh Zakat dan *Islamic Human Development Index* terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2017–2020. *AL-MUZARA'AH*, 10(2), 185–196.
<https://doi.org/10.29244/jam.10.2.185-196>
- ASHUR, M. A.-T. I. B. N., & EL-MESAWI,

- M. E.-T. (2006). *Treatise on Maqasid al-Shari'ah*. International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc673b>
- AUDA, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>
- Aydin, N. (2017). Islamic vs conventional Human Development Index: empirical evidence from ten Muslim countries. *International Journal of Social Economics*, 44(12), 1562–1583. <https://doi.org/10.1108/IJSE-03-2016-0091>
- Azlina, N., & Hasan, A. (2017). *The effectiveness of village fund management (case study at villages in coastal areas in Riau)*.
- Azzahra, S., Westi Riani, & Mafruhat, A. Y. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di 34 Provinsi – Indonesia pada Tahun 2015-2020. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i1.215>
- Badan Pusat Statistik. (2022, July 15). Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen. *Badan Pusat Statistik*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>
- BPS Provinsi Jawa Timur. (2022, 11 15). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur pada tahun 2022 mencapai 72,75. Retrieved from [https://jatim.bps.go.id/pressrelease/2022/11/15/1309/indeks--pembangunan-manusia--ipm--jawa-timur-pada-tahun-2022--mencapai-72-75.html#:~:text=IPM%20Jawa%20Timur%20tahun%202022,poin\)%20dibandingkan%20capaian%20tahun%20sebelumnya](https://jatim.bps.go.id/pressrelease/2022/11/15/1309/indeks--pembangunan-manusia--ipm--jawa-timur-pada-tahun-2022--mencapai-72-75.html#:~:text=IPM%20Jawa%20Timur%20tahun%202022,poin)%20dibandingkan%20capaian%20tahun%20sebelumnya)
- Databoks. (2022, January 11). Kabupaten Ini Merupakan Kantong Kemiskinan Jawa Timur. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/databoks.katadata.co.id/datapublikasi/2022/01/11/kabupaten-ini-merupakan-kantong-kemiskinan-jawa-timur>
- DJPK Kemenkeu. (2022). Portal Data APBD dan TKDD. Retrieved from djpk.kemenkeu.go.id: <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Sharī'ah. *Occasional Papers* 235.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=bttwENORfhgC>
- Davis, E. P., & Sanchez-Martinez, M. (2015). *Economic theories of poverty*.
- Dewi, R. S., & Irama, O. N. (2018). Pengaruh pendapatan desa dan alokasi dana desa terhadap belanja desa dan kemiskinan. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 5(2).
- Harahap, A. Y. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi: Desa di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang). *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 1(3), 151–157. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v1i3.196>
- Hendratno, E. T. (2009). *Negara kesatuan, desentralisasi, dan federalisme* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Hermawan, A., Istiqomah, I., & Ahmad, A. A. (2021). The Effect of Village Funds on Rural Poverty: Empirical Evidence From Java Island. *ICORE*, 5(1).
- Hermawati, L., Susetyo, D., Azwardi, & Yulianita, A. (2022). Direct Effects of Village Fund Program on the Human Development Index, and Its Implications on Poverty Level. *Proceedings of the 7th Sriwijaya Economics, Accounting, and Business Conference (SEABC 2021)*, 94–99. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220304.012>
- Iftitah, A. E., & Wibowo, P. (2022). PENGARUH DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, DAN PENDAPATAN

- ASLI DESA TERHADAP INDEKS DESA MEMBANGUN DI KABUPATEN GOWA. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 17–36.
<https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2331>
- Kawulur, S., Koleangan, R. A. M., & Wauran, P. C. (2019). Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Desa Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(03).
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah, Dan kebijakan)*, edisi Ke empat. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Kusnandar, V. B. (2022, November 11). *Ini Wilayah dengan Porsi Umat Muslim Tertinggi di Pulau Jawa pada Juni 2022*. Databooks.Katadata.Co.Id.
- Kusumastuti, A., Khoiron, A. M., & Achmadi, T. A. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif (Pertama)*. Deepublish.
- Mahri, J., Cupian, Rianto, M. N., Arundina, T., Widiastuti, T., Mubarak, F., Fajri, M., Azizon, & Nurasyiah, A. (2021). *EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM* (S. E. Hidayat & A. Sakti, Eds.; Pertama). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Nandita, D. A., Alamsyah, L. B., Jati, E. P., & Widodo, E. (2019). Regresi Data Panel untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB di Provinsi DIY Tahun 2011-2015. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 2(1), 42.
<https://doi.org/10.13057/ijas.v2i1.28950>
- Nuraini, S., Heriyati, D., Millati, I., Puriyanti, A. D., & Lestari, R. D. (2021). Village Funds: A Study of Community Village Monitoring. *Proceedings of the International Conference on Management, Business, and Technology (ICOMBEST 2021)*, 76–80.
<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.211117.011>
- Nurlayli, S., & Jumarni, J. (2022). Pengaruh Islamic Human Development Index (IHDI) dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2020. *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi*, 14(2), 114–130.
<https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v14i2.3089>
- Potabuga, V. (2022, November 1). Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. *Bungko.Desa.Id*.
- Rachman, A., Kornita, S. E., & Tampubolan, D. (2023). Pengaruh Dana Desa, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Langsung Terhadap Kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2016–2020. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 408–421.
- Rahim, Z. A., Sofyan, S., & Esya, L. (2022). Human Development Index Analysis with Islamic Human Development Index (IHDI) Approach in DKI Jakarta in 2010-2019. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(1), 133–146.
- Rinaldi, M., Nainggolan, E., Rejeki, S., & Panggabean, F. Y. (2022). Analisis Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara pada Kondisi Pandemi COVID 19. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 143–152.
- Sadeq, A. M. (2006). *Development issues in Islam*. IUM Research Center.
- Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105–119.
<https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.170>
- Spicker, P. (n.d.). *Poverty and the welfare state: Dispelling the myths*.
- Surabaya Pagi. (2023, January 20). Gawat, Penduduk Miskin Terbanyak ada di Jawa Timur. *Surabayapagi.Com*.
- Tarmizi, H., & Miksalmina, M. (2020). Pengaruh Dana Desa dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 5(4), 201–211.
- Widiastuti, T., Mawardi, I., Zulaikha, S., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Atiya, N. (2022). The nexus between Islamic social finance,

- quality of human resource, governance, and poverty. *Heliyon*, 8(12), e11885.
- Widodo, I. (2017). Dana Desa dan Demokrasi dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 65.
<https://doi.org/10.15294/jpi.v2i1.8487>
- Zahro, F. (2022, February 25). Alokasi Dana Desa Rp 7,76 Triliun Tahun 2022, Jatim Telah Rp 601,6 Miliar di 1.839 Desa Salurkan. *Surya.Co.Id*.